

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota memiliki peran yang sangat penting sebagai pusat pertumbuhan wilayah serta menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya suatu daerah. Berbagai jenis pelayanan berupa sarana dan prasarana penunjang kehidupan sangat mudah ditemukan di daerah kota. Tidak hanya itu, kemudahan akses untuk menjangkau fasilitas tersebut juga menjadi suatu kelebihan tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Berbagai kelengkapan dan kemudahan yang diberikan di kota menjadi suatu daya tarik bagi masyarakat yang berada di desa ataupun di luar kota lainnya, sehingga sangat wajar jika kemudian pertumbuhan penduduk di kota meningkat tajam karena adanya pendatang yang berasal dari luar kota secara urbanisasi maupun migrasi.

Umumnya tujuan utama penduduk berpindah ke kota adalah karena dorongan ekonomi yakni untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih beragam dan menaikkan taraf ekonomi menjadi lebih baik dibandingkan tempat asalnya. Akan tetapi, beberapa sektor selain perekonomian seperti permukiman, pendidikan, dan pariwisata juga ikut berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk tersebut. Akibatnya banyak kota yang berkembang sangat pesat bahkan memunculkan sentral kota yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan taraf hidup yang lebih tinggi.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi secara terus menerus memunculkan suatu konsekuensi yang serius terhadap masalah tata ruang kota yaitu adanya tuntutan peningkatan kebutuhan keruangan dalam rangka memenuhi kebutuhan permukiman, perdagangan, pelayanan sosial, hingga sarana rekreasi. Kebutuhan akan keruangan tersebut sering berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan yang terbatas. Keterbatasan ini mengakibatkan tidak semua kebutuhan ruang penduduk dapat terpenuhi sehingga terjadi desakan penggunaan lahan yang melebihi kemampuan daya dukung lahan tersebut,

bahkan cenderung memaksakan penggunaan lahan dengan cara yang tidak tepat.

Peruntukkan penggunaan lahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang di dalamnya telah diatur secara detail mengenai ketentuan umum, tugas dan wewenang, pengaturan dan pembinaan, pelaksanaan penataan ruang, hak dan kewajiban masyarakat, hingga evaluasi dan penyidikan yang berkenaan dengan tata ruang. Undang-undang tersebut juga memiliki turunannya pada tiap tingkat otonomi daerah dalam bentuk peraturan daerah yang berguna untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi serta karakteristik di lapangan. Akan tetapi, Realitanya implementasi undang-undang penataan ruang sangat sulit diterapkan karena kebutuhan ekonomi lebih diutamakan dibandingkan dengan beban yang harus ditanggung oleh lingkungan. Akibatnya sentralisasi penduduk yang berlebihan dipusat kota tidak dapat dihindarkan, hasilnya penggunaan lahan menjadi tidak terkoordinasi dan luput dari pengawasan pemerintah membuat menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ada.

Salah satu sisi kota yang sering kali menjadi korban dalam kelalaian penggunaan lahan adalah kawasan tepi sungai atau yang dikenal secara umum dengan kawasan bantaran sungai. Hakikatnya bantaran sungai adalah kawasan alami yang berfungsi sebagai ruang peyalur banjir jika lembah sungai tidak mampu menampung debit air dalam waktu tertentu. Karena fungsi ekologisnya yang sangat penting, bantaran sungai dijadikan sebagai kawasan lindung yang seharusnya dijaga fungsionalnya dan sudah selayaknya terhindar dari segala aktivitas yang menurunkan fungsinya.

Persebaran bangunan yang tidak terkendali memberi dampak pada kawasan bantaran sungai dengan timbulnya tutupan-tutupan lahan yang berpotensi mengurangi nilai fungsi dari lahan tersebut. Selain itu, Penggunaan ruang yang tidak sesuai pada kawasan bantaran sungai menyebabkan alih fungsi lahan sehingga lahan yang menjadi kawasan banjir alami berubah menjadi pemukiman atau tempat pusat aktivitas penduduk. Dampak dari

perubahan tersebut akan berakibat munculnya kemungkinan dampak-dampak negatif yang lebih kritis dibandingkan sebelumnya.

Banyak kota-kota di Indonesia yang selalu terkena banjir tiap kali musim penghujan tiba. Contohnya daerah Jakarta dan sekitarnya sudah tidak asing lagi dengan masalah banjir tiap tahunnya. Dikutip dari berita Kompas, pada awal tahun 2020 saja warga Jakarta, Tangerang, dan Bekasi sudah dilanda banjir selama lebih dari dua minggu. Lokasi geografisnya yang berada di dekat teluk dengan kawasan yang padat bangunan dan berdempetan dengan sungai, tentu masalah banjir akan sulit dihindari. Beberapa kota lain juga mengalami hal yang sama seperti Jakarta. Dihimpun dari berbagai media berita, dari daerah kota di Jawa Tengah seperti Tegal dan Semarang hingga kota-kota di Kalimantan seperti Samarinda, Balikpapan dan Banjarmasin pada Tahun 2020 mengalami banjir yang melanda daerahnya. Curah hujan yang tinggi, ketinggian daerah yang rendah, kawasan yang padat bangunan dan dempetnya dengan sungai merupakan beberapa kesamaan faktor yang mengakibatkan peristiwa tersebut terjadi.

Sebagai salah satu pulau tropis terbesar di Indonesia, pulau Kalimantan juga merupakan salah satu pulau yang tidak luput dari adanya banjir di kota-kota besar. Daratan yang sangat luas dan perbedaan ketinggian yang tidak begitu jauh (relatif datar), membuat sungai-sungai di Kalimantan memiliki aliran yang sangat panjang. Karena luas ini pula menyebabkan sungai di Kalimantan berkembang menjadi sungai-sungai besar di sepanjang daratan dan membentuk hamparan bentukan lahan fluvial. Sebagai akibat dari morfologi fluvial yang dominan, berdampak pada banyaknya peristiwa banjir yang terjadi tidak hanya di daerah hilir, tetapi juga dapat terjadi pada daerah-daerah yang berdekatan dengan bagian hulu sungai. Oleh karena itu, diperkirakan daerah Kalimantan memiliki potensi dampak banjir yang lebih kritis.

Dilihat dari data banjir di Pulau Kalimantan, terdapat tren peningkatan banjir di beberapa provinsi yang terjadi dalam 5 tahun terakhir, yakni di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Tren tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Data Tren Banjir Kalimantan

No	Provinsi	Tahun					Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kalimantan Barat	50	19	50	55	2	176
2	Kalimantan Selatan	15	20	64	25	5	129
3	Kalimantan Tengah	25	30	64	20	3	142
4	Kalimantan Timur	14	12	22	8	8	64
5	Kalimantan Utara	1	5	6	8	7	27

Sumber: Pengolahan Data dari BNPB 2018-2022

Sesuai dengan data pada Tabel 1.1 Data Tren Banjir Kalimantan dapat dilihat bahwa kelima provinsi di Kalimantan memiliki tren banjir yang berubah-ubah dari Tahun 2018-2022, terutama provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki tren perubahan banjir cukup signifikan dibandingkan dengan provinsi lainnya. Artinya ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya banjir di Kalimantan Selatan dan ditambah dengan kondisi sungai-sungai di Kalimantan Selatan yang saling terintegrasi dalam sistem DAS Barito. Walaupun demikian, pada Tahun 2021 dan 2022 terdapat penurunan jumlah banjir di Kalimantan Selatan dan diikuti provinsi lainnya juga.

Kota Amuntai adalah salah satu kawasan perkotaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Salah satu keunikan dari Kota Amuntai adalah kota ini tepat berada di pertemuan muara dari dua sungai besar di Kalimantan Selatan yaitu Sungai Balangan dan Sungai Tabalong. Sungai Balangan dan Sungai Tabalong yang melewati Kota Amuntai merupakan bagian dari DAS Barito yang berhulu di pegunungan Meratus utara dengan masing-masingnya bermula dari kabupaten Balangan dan kabupaten Tabalong. Kedua sungai tersebut memiliki karakteristik sungai daerah pertengahan dimana alirannya yang tenang serta terdapat banyak meander.

Pertemuan antara Sungai Balangan dan Sungai Tabalong membentuk kenampakan lahan fluvial yang luas di Kota Amuntai. Selain terbentuknya aliran sungai baru yakni Sungai Nagara, pertemuan sungai besar tersebut pula membentuk lahan rawa yang sangat luas. Lahan rawa di sekitar Kota Amuntai sepanjang tahun selalu basah walau pada musim kemarau sekalipun. Terpantau sepanjang Tahun 2022, ketika musim hujan air dapat menggenang lebih dari

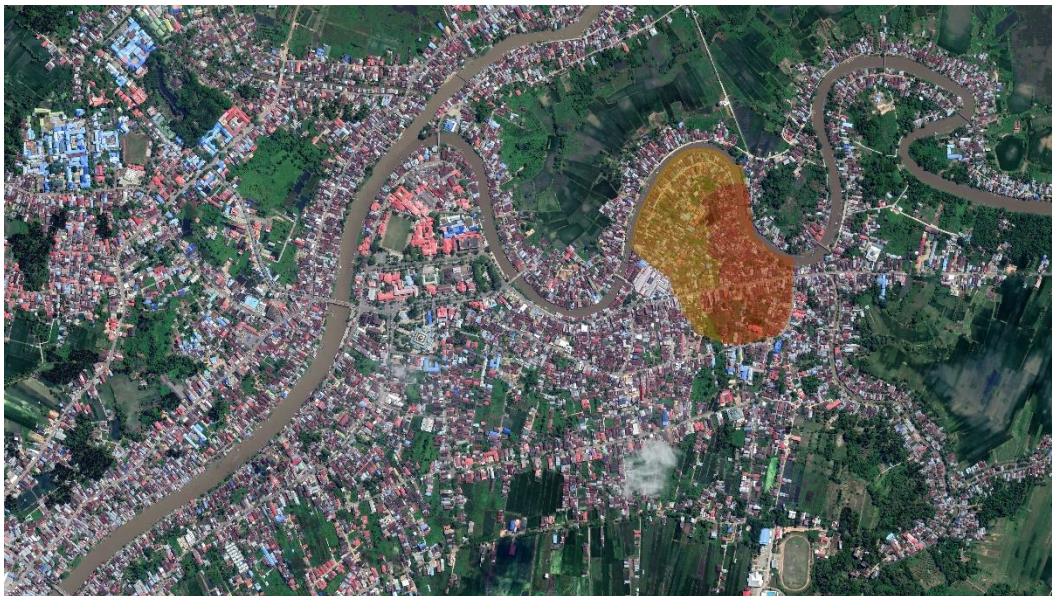
10 cm dan tidak mengalami kekeringan ketika musim kemarau. Rawa yang ada juga telah membentuk formasi lebak yang lebih dalam di daerah pertengahan dan ekosistem hutan rawa yang lokasinya lebih jauh. Adanya bentukan alam berupa rawa-rawa mengindikasikan bahwa daerah Kota Amuntai merupakan daerah dengan dataran rendah bahkan membentuk cekungan. Bentuk morfologi yang demikian merupakan kawasan yang rentan tergenang air baik karena hujan ataupun limpasan air sungai. Hal tersebut terbukti berdasarkan studi literatur dari beberapa majalah dan koran berita menunjukkan bahwa setiap intensitas hujan sedang tinggi, maka resiko kota Amuntai terendam banjir sangat tinggi.

Dihimpun dari data-data yang diolah oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, banjir selalu terjadi sekitar Bulan Oktober hingga Bulan April dimana bulan-bulan tersebut merupakan musim penghujan di Indonesia termasuk Kalimantan. Setiap musim penghujan pula Sungai Balangan dan Sungai Tabalong mudah meluap sehingga berdampak besar pada terjadinya banjir di Kota Amuntai. Data dari koran berita daerah seperti mata banua, banjarmasin post, dan radar banjarmasin juga menunjukkan data yang serupa, yang mana sepanjang 5 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2022 Kota Amuntai tidak luput dari banjir, terkadang banjir tersebut memuncak pada Bulan November dan terkadang pada Bulan April. Bahkan pada Tahun 2015 Kota Amuntai pernah mengalami siaga 1 banjir yang menjadikan banjir terparah sepanjang 10 tahun terakhir.

Banjir yang semakin intens terjadi membawa kekhawatiran bagi masyarakat kota Amuntai. Ditengah perkembangan kota yang pesat, masyarakat dan pemerintah harus menghadapi masalah serius berkenaan dengan daya dukung lingkungan. Memilih antara kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan kemampuan lingkungan dalam menanggung beban pembangunan ternyata menimbulkan konsekuensi yang sangat serius ketika fungsional dari suatu kawasan sungai diabaikan untuk kebutuhan masyarakatnya. Kekhawatiran lain muncul dengan kondisi rona lingkungan yang sekarang akan semakin kritis mengingat adanya potensi kota Amuntai

berkembang menjadi kota administratif yang lebih kompleks. Jika masalah kesenjangan pembangunan dan lingkungan ini tidak segera diatasi, jelas akan mengancam rona lingkungan sungai di kota Amuntai dan juga akan berdampak pada DAS Barito sebagai kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan di daerah tersebut.

Berdasarkan observasi awal ke lapangan dan melalui pantauan citra satelit sebagaimana dalam Gambar 1.1, terdapat kecenderungan penyalahgunaan lahan bantaran sungai di Kota Amuntai yakni banyaknya bangunan permukiman dibangun pada kawasan yang teridentifikasi sebagai bantaran sungai. Selain itu, intensnya penggunaan lahan tidak sesuai dengan kondisi daya dukung lingkungannya yang mana Kota Amuntai ini berdiri di atas meander sungai yang tergolong sebagai kawasan lindung. Intensitas banjir yang terjadi juga menjadi salah satu gejala yang menunjukkan bahwa adanya ketimpangan antara penggunaan lahan dan daya dukung lahan.



Gambar 1.1
Citra Satelit Kota Amuntai dan Daerah Sekitarnya
Sumber: Citra Google Earth (2023)

Berdasarkan sejarahnya, permukiman di daerah pinggiran sungai sudah terbentuk sejak lama bahkan jauh sebelum adanya peraturan perundang-undangan mengenai tata ruang wilayah. Terbentuknya permukiman tersebut merupakan cara hidup masyarakat Suku Banjar yang mendiami Kalimantan

Selatan dengan bertempat tinggal dan beradaptasi pada lingkungan yang berorientasi sungai dan rawa-rawa. Pada waktu lampau masyarakat memanfaatkan sungai-sungai sebagai pusat aktivitas dan jalur transportasi, sehingga kondisi di bantaran sungai dan sekitarnya sangat diperhatikan kelestariannya. Selain itu masyarakat juga mengelola lahan dengan mengedepankan kearifan lokal, oleh karena itu pada waktu tersebut penggunaan lahan dinilai masih sesuai antara aktivitas masyarakat dengan daya dukung lahan. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan semakin banyaknya sarana jalur darat yang mencapai daerah pedalaman, pola perkembangan permukiman berubah dari yang berorientasi sungai menjadi berorientasi jalan menyebabkan sungai-sungai menjadi kawasan yang terbelakang dari permukiman. Selain itu, perkembangan zaman juga diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang signifikan akibatnya pertumbuhan permukiman semakin intens dan penggunaan lahan dinilai menjadi tidak sesuai dengan daya dukung lahannya.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian ini lebih lanjut ke dalam skripsi mengenai penggunaan lahan di kawasan bantaran sungai kaitannya dengan evaluasi lahan di Kota Amuntai, sehingga dibuatlah penelitian dengan judul “Evaluasi Penggunaan Lahan Permukiman di Kawasan Bantaran Sungai Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dibuat rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penggunaan lahan permukiman di kawasan bantaran sungai Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara?
- b. Bagaimanakah evaluasi kesesuaian lahan permukiman di kawasan bantaran sungai Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara?

1.3 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pengertian dari variabel-variabel mengenai topik yang diangkat penulis yaitu sebagai berikut:

a. Evaluasi

Evaluasi diartikan sebagai kegiatan terencana guna mengetahui kondisi nyata suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan kondisi ideal sebagai tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan (Yunanda, 2009). Evaluasi termasuk kedalam riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat dan hasilnya dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi tersebut.

b. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah pemberdayaan sumber daya lahan untuk dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan agar tidak terjadi degradasi atau kerusakan lahan (Verstappen, 2014).

c. Permukiman

Permukiman adalah suatu kesatuan wilayah dimana suatu perumahan berada dan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasar untuk tempat bermukim manusia yang menunjukkan tujuan tertentu seperti memberikan kenyamanan pada penghuninya (Sunarti, 2019).

d. Bantaran Sungai

Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai yang dihitung dari tepi sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam (Siswoko dalam Restu, 2021).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penggunaan lahan permukiman di kawasan bantaran sungai Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian lahan permukiman di kawasan bantaran sungai Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang penulis susun diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk semua pihak yang terkait dengan topik penelitian ini

khususnya untuk masyarakat di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada disiplin ilmu geografi terkhusus tentang penggunaan lahan permukiman dan evaluasi penggunaan lahannya yang berkaitan dengan penilaian terhadap kesesuaian lahan permukiman di kawasan bantaran sungai Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Kegunaan secara Praktis

- 1) Bagi masyarakat, dapat menjadi acuan untuk memahami penggunaan lahan permukiman yang sesuai dan menjadi bahan masukan dalam upaya mengembangkan kawasan permukiman.
- 2) Bagi pemerintah, menjadi bahan masukan dalam perencanaan kebijakan khususnya dalam penyusunan program di bidang permukiman dan tata ruang wilayah Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 3) Bagi peneliti, memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang evaluasi penggunaan lahan terkhusus pada kawasan permukiman di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.